


Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah
2. Inspektorat Kota Denpasar
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

| | |
|--|---|
|  <p>#BerAKHLA Berorientasi Pelayanan Akurasi Belanja Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif</p> <p>STOP! KORUPSI</p> | <p>Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang member sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik.</p> |
|--|---|

DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR



LAPORAN MANAJEMEN RESIKO

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| DAFTAR LAMPIRAN | 1 |
| KATA PENGANTAR | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | |
| B. Dasar Hukum | |
| C. Maksud Dan Tujuan | |
| D. Ruang Lingkup | |
| BAB II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH | |
| A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025..... | |
| B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025 | |
| BAB IV HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN | |
| BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP | |
| BAB V PENUTUP | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Risiko .

Lampiran 2 Daftar Risiko Prioritas

Lampiran 3 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan .

Lampiran 4Daftar Rencana Tindak Pengendalian.

Lampiran 5 Pemantauan Kegiatan Pengendalian

Lampiran 6 pencatatan kejadian resiko (risk event) dan pelaksanaan RTP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat Nya Laporan Pengelolaan Risiko Dinas kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Manajemen risiko berkelanjutan yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi dampak serta mengurangi risiko lain terhadap penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan yang ada diselenggarakan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Kegiatan manajemen resiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian resiko dan kegiatan pengendalian yang Telah dilaksanakan.

Kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak dalam penyusunan laporan pengelolaan resiko ini serta terhadap pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Semoga pelaksanaan manajemen risiko ini dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana ditekankan perlunya suatu upaya untuk meningkatkan penerapan pengendalian internal pemerintah secara sistematis, masif dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

B. Dasar Hukum

Laporan ini disusun berdasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Derah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 2)
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Nomor: 700.1.1/7884 /Dikes Tentang Pembentukan Struktur Pengelola Resiko Pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko dalam rangka meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar sesuai amanat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Manajemen risiko ini fokus kepada rencana tindak pengendalian atas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun

2025. Dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Serta Realisasi atas rencana tindak pengendalian yang diharapkan terpenuhi dalam periode tahun 2025.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar, perlu disusun strategi dan kebijakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan SPIP guna mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien serta ketaatan terhadap perundang-undangan. Adapun rencana kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Identifikasi Resiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 71 (dari populasi risiko) dengan rincian sebagaimana terdapat pada **lampiran 1**.

2. Analisis Resiko Dan Evaluasi Resiko

Dari 71 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko yang disampaikan kepada unit manajemen risiko) telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah risiko yang berada diatas selera risiko sebanyak 0 risiko (0 dari risiko) yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **lampiran 2**
- b. Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 1 risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas)
- c. Sebanyak 1 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 100 % dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **lampiran 3**

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar dilaksanakan melalui pengendalian oleh Unit Pemilik Risiko dengan pendekatan Manajemen Risiko(MR) terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang cukup besar dan berisiko terjadi permasalahan. Realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas

Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2025 didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada **lampiran 4**.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada Tahun 2025 sebanyak 2 Atau 100 % kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada **lampiran 5**.
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada **triwulan berikutnya**.

Namun demikian pada awal September tahun 2025 diluar prediksi terjadi resiko bencana, telah terjadi bencana banjir di Kota Denpasar yang salah satunya berdampak kepada sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan khususnya RSUD Wangaya dan Pustu Dauh Puri (wilayah kerja UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat II). Sehingga memerlukan mitigasi bencana berupa pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulance serta obat dan BMHP yang rusak karena banjir. Komitmen Pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan telah dilakukannya pengajuan penambahan anggaran pada rencana perubahan anggaran tahun 2025 dan pergeseran anggaran akibat bencana yang meliputi :

1. Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah
2. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3. Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota

Sehingga diharapkan tidak berdampak serius terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, lintas OPD terkait dan berbagai pihak sehingga penyelenggaraan layanan bisa segera dilaksanakan setelah upaya pembersihan sampah dan lumpur akibat banjir. Dimana sebelumnya dialihkan dahulu ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas induk dan posko-posko pelayanan yang ada serta dilaksanakannya safari kesehatan dan kunjungan rumah /perkesmas pada wilayah berdampak.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2025 ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun sehingga terjadi gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan resiko pemerintah daerah. Adapun beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Mobilitas Penduduk yang cukup tinggi di Kota Denpasar ditambah lagi belum optimalnya sistem pencatatan penduduk pendatang sehingga masih kesulitan membedakan penduduk permanen dan non permanen dalam pencatatan dan pelaporan serta dalam upaya tindak lanjut program/kegiatan penurunan angka kematian Ibu, kematian bayi dan balita.
2. Peran Serta Masyarakat dan Lintas sektor dalam upaya-upaya pencapaian program/kegiatan di bidang kesehatan masih menjadi kendala seperti pendataan sasaran, pelaporan kejadian-kejadian bidang kesehatan (kejadian kesakitan baik penyakit menular seperti DBD, rabies dan penyakit menular lainnya serta penyakit tidak menular seperti HT dan DM, maupun kejadian kematian dan kejadian lainnya terkait pemantauan / epidemiologi penyakit lainnya di masyarakat).
3. Sarana Dan Prasarana serta kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun klinik/rumah sakit rujukan (terutama non pemerintah) masih perlu mendapat perhatian jika melihat dari hasil audit kejadian kematian ibu, bayi dan balita masih ditemukan di RS karena faktor keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi petugas.

BAB IV

MONITORING RESIKO DAN RTP

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada tabel Lampiran 6.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan pengelolaan risiko yang berkelanjutan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen resiko dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Dinas Kesehatan Kota Denpasar memiliki sasaran strategis meningkatnya pelayanan kesehatan dimana dilakukan dengan mengoptimalkan tata kelola pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama yaitu memeningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan meningkatnya umur harapan hidup (UHH). Strategi dan tindak lanjut pengelolaan risiko adalah dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik bulanan maupun triwulan ke bidang-bidang teknis yang mengampu kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar



dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 196709151998032003

Semua jenis layanan di Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak dikenakan biaya. Untuk menjaga integritas seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Denpasar tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun. Bagi penerima layanan dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun, jika ada yang meminta sesuatu dengan mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar dipastikan merupakan penipuan dan dapat dilaporkan melalui email kesehatan@denpasarkota.go.id dengan disertai bukti otentik

Lampiran 1 Hasil Analisis Risiko .

| Hasil Analisis Risiko | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|-------------------|--------------|
| Nama Pemda | | : Pemerintah Kota Denpasar | | | |
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | |
| Tujuan Strategis | | : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | |
| Analisis Risiko | | | | | |
| No. | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Skala Dampak | Skala Kemungkinan | Skala Resiko |
| a | b | c | d | e | f=dxe |
| I Risiko Strategis Pemda | | | | | |
| 1 | tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar | RSP.25.02.06.01 | 3 | 2 | 6 |
| II Risiko Strategis OPD | | | | | |
| 1 | tidak tercapainya indikator-indikator kinerja program yaitu masih terjadinya KLB, meningkatnya angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting | RSO.25.02.06.02 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | Administrasi esekretariat tidak terselesaikan tepat waktu | RSO.25.02.06.01 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin | RSO.25.02.06.03 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | adanya tempat pengelolaan makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat | RSO.25.02.06.04 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat | RSO.25.02.06.05 | 3 | 2 | 6 |
| III Risiko Operasional OPD | | | | | |
| 1 | tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif dan lansia), tidak optimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit menular dan tidak menular, tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dan tidak optimalnya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan kepada masyarakat | ROO.25.02.06.07 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | masih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang tidak Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan | ROO.25.02.06.06 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | rendahnya persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | ROO.25.02.06.12 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin | ROO.25.02.06.13 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | adanya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tidak dilakukan pengawasan serta tidak memiliki Stiker Pembinaan | ROO.25.02.06.16 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | adanya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang tidak diawasi dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi | ROO.25.02.06.15 | 3 | 2 | 6 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|---|---|---|
| 7 | tidak Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman | ROO.25.02.06.17 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | tidak optimalnya kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | ROO.25.02.06.18 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan | ROO.25.06.02.01 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali | ROO.25.02.06.04 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | tidak tepatanya penyusunan RBA BLUD dan waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan BLUD | ROO.25.02.06.05 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Sistem Informasi Kesehatan tidak dikelola dengan optimal | ROO.25.02.06.08 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Faskes tidak memenuhi standar mutu | ROO.25.02.06.09 | 4 | 1 | 4 |
| 14 | adanya Industri Pangan Rumah Tangga yang tidak bersertifikat Produksi | ROO.25.02.06.14 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin | ROO.25.02.06.10 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | tidak optimalnya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | ROO.25.02.06.19 | 3 | 1 | 3 |
| 17 | Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor | ROO.25.02.06.02 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Tidak tepatnya waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk penunjang operasional kantor | ROO.25.02.06.03 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM | ROO.25.02.06.11 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | |
| IV | Risiko Fraud OPD | | | | |
| 1 | Penyusunan RBA yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.10 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.03 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.07 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Penyusunan kebutuhan pemeliharaan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.08 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.09 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.11 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Penyusunan rencana penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.12 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.13 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.14 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.19 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Penyusunan kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.06 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.15 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Penyusunan rencana Sistem Informasi Kesehatan untuk pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.16 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.17 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.22 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.18 | 3 | 1 | 3 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|---|---|
| 17 | Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.21 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | RF.25.02.06.23 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.26 | 3 | 1 | 3 |
| 20 | Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.28 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | RF.25.02.06.30 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.31 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga | RF.25.02.06.33 | 3 | 1 | 3 |
| 24 | Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.34 | 3 | 1 | 3 |
| 25 | Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) | RF.25.02.06.36 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.37 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan | RF.25.02.06.39 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | Penyusunan rencana kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.40 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Benturan kepentingan dalam proses Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | RF.25.02.06.42 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | Penyusunan rencana kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.43 | 3 | 1 | 3 |
| 31 | Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.45 | 3 | 1 | 3 |
| 32 | Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang akan pensiun | RF.25.02.06.01 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.02.06.02 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.02.06.04 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban | RF.25.02.06.05 | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|---|---|
| 36 | Benturan kepentingan dalam proses Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan | RF.25.02.06.20 | 2 | 1 | 2 |
| 37 | Penyusunan rencana kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.24 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.25 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.27 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.29 | 2 | 1 | 2 |
| 41 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.32 | 2 | 1 | 2 |
| 42 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.35 | 2 | 1 | 2 |
| 43 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.38 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.41 | 2 | 1 | 2 |
| 45 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.44 | 2 | 1 | 2 |
| 46 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.46 | 2 | 1 | 2 |

Lampiran 2 Daftar Risiko Prioritas

| Form 5 | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------|----------------|----------|--------|
| Daftar Risiko Prioritas PEMDA | | | | | | |
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | | |
| Tahun Penilaian | : 2025 | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | | | |
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
| a | b | c | d | e | f | g |
| I | Risiko Strategis | | | | | |
| 1 | tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar | RSP.25.02.06.01 | ↳ | ↳ | ↳ | ↳ |
| | | | | | | |

Lampiran 3 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

| Form 7 | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------|
| Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA | | | | | | | |
| (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA | | | | | | | |
| Nama Pemda | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | | | |
| Tahun Penilaian | : 2025 | | | | | | |
| Tujuan Strategis | : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | | | | |
| No | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *) | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian | Pemilik/Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| I | Risiko Strategis | | | | | | |
| 1 | tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar | RSP.25.02.06.01 | * SOP program/kegiatan *pemberdayaan masyarakat * KAK program/kegiatan * koordinasi LS terkait penyelenggaraan program/kegiatan | SOP, KAK, JUKNIS, inovasi pelayanan/.program | * update SOP program/kegiatan *meningkatkan pemberdayaan masyarakat * update KAK program/kegiatan * meningkatkan koordinasi LS terkait penyelenggaraan program/kegiatan | Dikes | 1 Tahun Anggaran |
| 2 | | | | | | | |

Lampiran 4Daftar Rencana Tindak Pengendalian

| Form 8 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA | | | | | | | |
| Nama Pemda | | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | | |
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1 | Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang optimal | Rencana Kegiatan Anggaran, Telaah Staf | Dikes | Walikota Denpasar, Bappeda, BPKAD, TAPD | Pertemuan Pencermatan dan Penelitian Anggaran Induk dan Anggaran Perubahan | Saat penyusunan RKA Induk dan Perubahan | |
| 2 | Meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan sesuai standar | Rencana Kegiatan Anggaran, Telaah Staf Pertemuan, sosialisasi, orientasi, inhouse training, workshop, pelatihan | Dikes Kota Denpasar, Dikes Propinsi Bali, KEMENKES | Walikota Denpasar, Bappeda, BPKAD, TAPD seluruh tenaga kesehatan yanag ada | Penyelenggaraa n sesuai kebutuhan | 1 tahun anggaran | |

Lampiran 5 Pemantauan Kegiatan Pengendalian

| Form 9 | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|------------|
| RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA | | | | | | |
| Nama Pemda | | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | |
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 | Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang optimal | Rencana Kegiatan Anggaran, Telaah Staf | Dikes | Penyusunan RKA Induk dan Perubahan setiap tahun anggaran | Januari sampai Desember 2025 | |
| 2 | Meningkatkan kompetensi sumber daya kesehatan sesuai standar | monev pasca workshop/pelatihan pertemuan berkala program | Dikes | Koordinasi sesuai kebutuhan | Januari sampai Desember 2025 | |

Lampiran 6 pencatatan kejadian resiko (risk event) dan pelaksanaan RTP

| PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|-------|--|-------------------------|---|-------|
| Nama Pemda | | : Pemerintah Kota Denpasar | | | | | | | | |
| Tahun Penilaian | | : 2025 | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis | | : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | |
| Usuan Pemerintahan | | : Usuan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan | | | | | | | | |
| No | "Risiko" yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Tanggal terjadi | Kejadian Risiko | | Ket | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Ket |
| | | | | Sebab | Dampak | | | | | |
| I Risiko Strategis Pemda | | | | | | | | | | |
| 1 | tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar | RSP.25.02.06.01 | TW 2, TW 3 dan awal TW 4 tahun 2025 | adanya kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena : 1. Kematian ibu yang disebabkan karena Non Obsletrik (6 orang) 2. kematian ibu karena Penyakit Menular 3. kematian bayi karena BBLR (26 Bayi), 9 infeksi, 10 kelainan kongental, dan 12 kasus lainnya | menurunnya kualitas kesehatan masyarakat | NIHIL | * update SOP program/kegiatan *meningkatkan pemberdayaan masyarakat * update KAK program/kegiatan * meningkatkan koordinasi LS terkait penyelenggaraan program/kegiatan | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2 | tidak tercapainya indikator-indikator kinerja program yaitu masih terjadinya KLB, meningkatnya angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup, meningkatnya Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Turunnya Indeks Kesehatan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatnya Persentase Balita stunting | RSO.25.02.06.01 | TW 2, TW 3 dan awal TW 4 tahun 2025 | adanya kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena : 1. belum optimalnya Pelayanan kesehatan ibu , bayi dan balita sesuai standar, 2. belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan (e-koort, MPDN, Komdat, buku KIA) 3. Belum optimalnya pelaksanaan surveilans penyakit menular potensi KLB 4. Belum optimalnya mutu pelayanan sesuai yang diharapkan masyarakat 5. kompetensi/kapasitas petugas terkait program dan kegiatan kesehatan (Nakes , Kader) | meningkatnya AKI menjadi 130,9/100.000 KH dan AKB sebesar 9,5/1.000 KH serta resiko tidak tercapainya target angka harapan hidup (AHH) Kota Denpasar | NIHIL | 1. AMP (audit meermal & perinatal) 2. menoptimalkan input pada sistem pencatatan dan pelaporan (e-koort, MPDN, Komdat, buku KIA) 3. orientasi nakes 4. orientasi Kader 5.penguatan jejaring pelayanan dengan RS (dengan membentuk tim koordinasi) | 1 tahun anggaran | 1. AMP (audit meermal & perinatal) sudah 2 kali kegiatan sd TW 3 2. menoptimalkan input pada sistem pencatatan dan pelaporan (e-koort, MPDN, Komdat, buku KIA) dengan pertemuan dan movev serta pembinaan rutin setiap bulan 3. orientasi nakes 4. orientasi Kader 5. penguatan jejaring pelayanan dengan RS (dengan membentuk tim koordinasi) 6. adanya Inovasi Lagu Bunda (layanan data terintegrasi ibu bayi Kota Denpasar) | NIHIL |
| 3 | adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin | RSO.25.02.06.02 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4 | adanya tempat pengelolaan makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat | RSO.25.02.06.03 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5 | adanya Rumah Tangga yang tidak melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) | RSO.25.02.06.04 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6 | Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu | ROO.25.06.02.01 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan | ROO.25.06.02.02 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8 | Persekongkolan pembayaran gaji pegawai negeri yang akan pensiun | RF.25.02.06.01 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9 | Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar | RF.25.02.06.02 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10 | Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor | ROO.25.02.06.03 | TW 2 tahun 2025 | Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa karena ada nya perubahan sistem pengadaan E katalog dr V5 ke V6 | Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target | NIHIL | peningkatan kapasitas SDM | NIHIL | 1. koordinasi dan konsultasi ke UK PBJ setda kota Denpasar 2. mengikuti sosialisasi offline & online terkait terkait PBJ yaitu inaproc V6 | NIHIL |
| 11 | Penyusunan anggaran kebutuhan kantor dan Rencana Kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan ril | RF.25.02.06.03 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12 | Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa | RF.25.02.06.04 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 13 | Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyusapan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara | RF.25.02.06.05 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 14 | Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek | RF.25.02.06.06 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 15 | Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban | RF.25.02.06.07 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 16 | Tidak tepatnya waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk penunjang operasional | ROO.25.02.06.04 | TW 2 tahun 2025 | Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa karena ada nya perubahan sistem pengadaan | Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target | NIHIL | peningkatan kapasitas SDM | NIHIL | 1. koordinasi dan konsultasi ke UK PBJ setda kota Denpasar 2. mengikuti sosialisasi offline & online | NIHIL |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|--|--|-------|---|-------|--|----------------------------------|
| 17 | Penyusunan kebutuhan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.08 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 18 | Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyimpangan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara | RF.25.02.06.09 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 19 | Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek | RF.25.02.06.10 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 20 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.11 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 21 | Adanya standar harga barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam perwali | ROO.25.02.06.05 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 22 | Penyusunan kebutuhan pemeliharaan BMD yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.12 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 23 | Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyimpangan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara | RF.25.02.06.13 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 24 | Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek | RF.25.02.06.14 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 25 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.15 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 26 | tidak optimalnya penyusunan RBA BLUD dan waktu realisasi pengadaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan BLUD | ROO.25.02.06.06 | TW 2 tahun 2025 | Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa karena adanya perubahan sistem pengadaan E katalog dr V5 ke V6 | Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target | NIHIL | peningkatan kapasitas SDM | NIHIL | 1. koordinasi dan konsultasi ke UK PBJ seldta kota Denpasar 2. mengikuti sosialisasi offline & online terkait terkait PBJ yaitu inaproc V 6 | NIHIL |
| 27 | Penyusunan RBA yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.16 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 28 | Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyimpangan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara | RF.25.02.06.17 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 29 | Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek | RF.25.02.06.18 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 30 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.19 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 31 | tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat | RF.25.02.06.20 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 32 | mesih adanya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang tidak Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan sesuai standar, adanya Pengadaan dan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan | ROO.25.02.06.07 | TW 3 tahun 2025 | ADANYA BENCANA BANJIR DI KOTA DENPASAR YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN PADA SARANA DAN PRASARANA DI RSUD WANGAYA DAN PUSTU DAUH PURI (PUSKESMAS DB II) | TERGANGGUNYA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT | NIHIL | PENGUSUSLAN PENAMBAHAN DANA DAN PERGESERAN BELANJA AKIBAT BENCANA BANJIR DI RSUD DAN PUSTU DAUH PURI/BIKA PEKAMBINGAN | NIHIL | 1. DISETUJUI DI ANGGARAN PERUBAHAN 2025 2. PROSES PENGGAJUAN PENDAMPINGAN /REVIEW OLEH INSPEKTORAT KOTA DENPASAR | USULAN BELANJA SUDAH TEREALISASI |
| 33 | Penyusunan rencana penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan kebutuhan riil | RF.25.02.06.21 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 34 | Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyimpangan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara | RF.25.02.06.22 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 35 | Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek | RF.25.02.06.23 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 37 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan buku-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.25 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 38 | tidak optimalnya pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif dan lansia), tidak optimalnya tata kelola dan pelayanan penyakit menular dan tidak menular, tidak optimalnya | ROO.25.02.06.08 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 39 | Penyusunan rencana Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan kebutuhan ril | RF.25.02.06.26 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 40 | Terjadinya pemecahan kegiatan PBJ karena adanya benturan kepentingan sehingga rawan terjadi penyuapan atau justru berpotensi pada kerugian keuangan negara | RF.25.02.06.27 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 41 | Calon Penyedia pada etalase katalog lokal kurang dari 3 (tiga) sehingga kurang mendukung pelaksanaan persaingan yang sehat dan berpotensi timbulnya fee proyek | RF.25.02.06.28 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 42 | tidak optimalnya Proses Pemberian Layanan kepada Masyarakat | RF.25.02.06.29 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 43 | Penyaluran bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku | RF.25.02.06.30 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 44 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan buku-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.31 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 45 | faskes tidak memenuhi standar mutu | ROO.25.02.06.10 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 46 | Penyusunan rencana kegiatan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan tidak sesuai kondisi ril | RF.25.02.06.32 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 47 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan buku-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.33 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 48 | Benturan kepentingan dalam proses Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan | RF.25.02.06.34 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 49 | Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan | RF.25.02.06.35 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 50 | adanya tenaga kesehatan yang praktek tidak memiliki ijin | ROO.25.02.06.11 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 51 | Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi ril | RF.25.02.06.36 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 52 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan buku-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.37 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 53 | Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | RF.25.02.06.38 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 54 | Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan | RF.25.02.06.39 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 55 | tidak terlaksananya perencanaan kebutuhan SDM | ROO.25.02.06.12 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 57 | Penyusunan laporan peranggungjawaban dengan buku-buku pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.41 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 58 | rendahnya persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | ROO.25.02.06.13 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 59 | Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.42 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 60 | Penyusunan laporan peranggungjawaban dengan buku-buku pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.43 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 61 | adanya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan & Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin | ROO.25.02.06.14 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 62 | Penyusunan rencana kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.44 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 63 | Penyusunan laporan peranggungjawaban dengan buku-buku pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.45 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 64 | Benturan kepentingan dalam proses Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | RF.25.02.06.46 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 65 | Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan | RF.25.02.06.47 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 66 | adanya Industri Pangan Rumah Tangga yang tidak bersertifikat Produksi | ROO.25.02.06.15 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 67 | Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.48 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 68 | Penyusunan laporan peranggungjawaban dengan buku-buku pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.49 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 69 | Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga | RF.25.02.06.50 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 70 | Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan | RF.25.02.06.51 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 71 | adanya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang tidak diawasi dan tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi | ROO.25.02.06.16 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 72 | Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan sertifikat laik sehat hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/resbran dan depot air minum (DAM) tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.52 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 73 | Penyusunan laporan peranggungjawaban dengan buku-buku pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.53 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 74 | Benturan kepentingan dalam proses Penerbitan sertifikat laik sehat hygiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/resbran dan depot air minum (DAM) | RF.25.02.06.54 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 75 | Penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan tidak sesuai ketentuan | RF.25.02.06.55 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 76 | adanya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang tidak dilakukan pengawasan serta tidak memiliki Stiker Pembinaan | ROO.25.02.06.17 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 77 | Penyusunan rencana kegiatan Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.56 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.57 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 79 | Beraturan kepinginan dalam proses Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan | RF.25.02.06.58 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 80 | tidak Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pewarna dan pengawet yang dilarang pada makanan/minuman | ROO.25.02.06.18 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 81 | Penyusunan rencana kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.59 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 82 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.60 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 83 | Beraturan kepinginan dalam proses Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | RF.25.02.06.61 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 84 | tidak optimalnya kegiatan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | ROO.25.02.06.19 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 85 | Penyusunan rencana kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.62 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 86 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.63 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 87 | tidak optimalnya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | ROO.25.02.06.20 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 88 | Penyusunan rencana kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat tidak sesuai kondisi riil | RF.25.02.06.64 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 89 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid | RF.25.02.06.65 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |